

POSISI RRT DALAM KONFLIK INSURGensi DI MYANMAR TAHUN 2023

Muhammad Abidzar¹, Sonny Sudiar²

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mulawarman

Abstrak

Penelitian ini menganalisis posisi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam konflik insurgensi Myanmar tahun 2023. Fokus utama penelitian ini adalah pada respons kebijakan luar negeri RRT terhadap krisis politik dan keamanan yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer tahun 2021. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, di mana data diperoleh dari laporan resmi, jurnal akademik, dan berita daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RRT menerapkan sikap netral-aktif, dengan tetap menjalin hubungan diplomatik dengan junta militer Myanmar, namun juga melakukan komunikasi dengan kelompok etnis bersenjata (EAOs) untuk melindungi kepentingannya. Kepentingan utama RRT terletak pada perlindungan terhadap investasi strategis, khususnya proyek-proyek di bawah inisiatif Belt and Road (BRI), serta menjaga stabilitas kawasan perbatasan dari potensi konflik yang meluas. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teori pengambilan keputusan Richard C. Snyder dan Model Aktor Rasional dari Graham Allison untuk menjelaskan pilihan-pilihan strategis yang diambil RRT. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri RRT merupakan hasil kalkulasi rasional untuk menjaga kepentingan nasionalnya di tengah dinamika konflik yang kompleks.

Kata Kunci: Republik Rakyat Tiongkok, Konflik Myanmar, Kebijakan Luar Negeri, Belt and Road Initiative, Aktor Rasional, Keputusan Politik.

Abstract

This research analyzes the position of the People's Republic of China (PRC) in the 2023 Myanmar insurgency conflict. The study focuses on China's foreign policy response to the political and security crisis in Myanmar following the 2021 military coup. Using a qualitative descriptive method with a literature study approach, the research draws on secondary data from official reports, academic journals, and news sources. The findings reveal that China adopts a neutral-active stance, maintaining diplomatic ties with the Myanmar junta while also engaging with ethnic armed organizations (EAOs) to protect its strategic interests. China's main concerns lie in safeguarding its investments, particularly under the Belt and Road Initiative (BRI), and ensuring border stability amid growing regional instability. The analysis applies Richard C. Snyder's decision-making theory and Graham Allison's Rational Actor Model to explain China's strategic choices. The study concludes that China's foreign policy behavior reflects rational calculations aimed at securing its national interests in a complex and evolving conflict environment.

Keywords: People's Republic of China, Myanmar Conflict, Foreign Policy, Belt and Road Initiative, Rational Actor, Political Decision-Making.

Pendahuluan

Terjadi konflik internal di Myanmar yaitu kudeta militer pada 1 Februari 2021. Dalam kudeta ini, militer Myanmar (Tatmadaw) yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan NLD di saat pemilihan umum 2021. Warga sipil Myanmar menentang pemerintahan junta tersebut dengan demonstrasi dan aksi mogok massal, namun direspon oleh militer dengan penangkapan, kekerasan, dan pembunuhan kepada para demonstran (Mckenna 2024).

Sebagai respons atas kekerasan junta, oposisi Myanmar membentuk pemerintahan bayangan bernama National Unity Government (NUG) dan pasukan bersenjata mereka People Defence Force (PDF) untuk melawan junta. Pada 27 Oktober 2023, kekuatan pemberontak gabungan bernama Three Brotherhood Alliance terdiri dari Arakan Army, MNDA, TNLA, dan lainnya. meluncurkan Serangan Operasi 1027 dengan tujuan merebut kota Laukkaing di perbatasan Myanmar–China. Kota Laukkaing pernah direbut kembali oleh militer, tetapi selama pandemi 2020 kota ini juga menjadi pusat besar sindikat penipuan daring yang dikendalikan oleh mafia Tiongkok. Warga Tiongkok yang dipaksa bekerja di kawasan scam tersebut diperlakukan buruk, sehingga pemerintah China meminta junta Myanmar membebaskan warga dan menghentikan aktivitas ilegal itu. Junta Myanmar mengabaikan permintaan ini.

Kembali RRT mendapat laporan kekerasan dan perlakuan buruk terhadap warga Tiongkok, pemerintah RRT mulai mengambil sikap dengan pendekatan kedua belah pihak yang berkonflik. Di satu sisi RRT tetap menjaga hubungan diplomatik dengan junta misalnya dengan menyatakan pemerintahan militer sah secara rezim, namun di sisi lain Tiongkok mulai mendekati kelompok bersenjata pemberontak Shan untuk menekan penyebaran kejahatan penipuan dan menjaga keamanan perbatasan (Michaels 2023).

Dari latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan posisi RRT dalam konflik internal Myanmar tahun 2023. Fokusnya adalah mendeskripsikan posisi dan argumentasi pemerintah RRT terhadap kedua belah pihak junta militer dan kelompok pemberontak dalam konflik bersenjata Myanmar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kebijakan luar negeri China dalam konteks krisis internal Myanmar.

Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori Konflik dan Teori Pengambilan Keputusan, yang diorientasikan untuk membantu penulis dalam menganalisa dan memahami permasalahan yang terjadi.

Teori Konflik

Teori konflik memandang bahwa konflik merupakan bagian alami dalam kehidupan sosial, dan terjadi karena adanya ketimpangan distribusi sumber daya dan kekuasaan. Menurut Karl Marx, konflik muncul akibat eksploitasi kelas pemilik modal terhadap kelas buruh, yang menjadi motor perubahan sosial (Marx 2010). Max Weber menambahkan bahwa konflik tidak hanya bersumber dari ekonomi, tetapi juga dari persaingan atas kekuasaan dan status sosial (Weber 1947). Ralf Dahrendorf melihat konflik sebagai akibat pertentangan kepentingan dalam struktur sosial, terutama antara mereka yang memiliki dan tidak memiliki otoritas (Dahrendorf 1959).

Dalam studi perdamaian, Johan Galtung menekankan bahwa konflik terdiri dari unsur aktor, kepentingan, sikap, dan perilaku, serta bisa menghasilkan kekerasan maupun solusi damai. Paul Conn membedakan konflik menjadi dua: zero-sum (tanpa kompromi) dan non zero-sum (masih bisa didialogkan). Teori konflik memberi pemahaman bahwa konflik, meski berpotensi destruktif, juga dapat memperkuat identitas kelompok dan mendorong perubahan sosial jika dikelola secara tepat.

Teori Pengambilan Keputusan (*Decision Making Theory*)

Teori pengambilan keputusan menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara ditentukan oleh proses aksi, reaksi, dan interaksi antar negara. Menurut Richard C. Snyder, keputusan negara dipengaruhi oleh faktor internal (seperti kondisi geografis, budaya, opini publik, dan struktur pemerintah) serta faktor eksternal seperti geopolitik, budaya asing, dan tekanan dari negara atau organisasi internasional. Aktor pembuat keputusan akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam menyusun kebijakan luar negerinya.

Selain itu, Graham T. Allison membagi proses pengambilan keputusan menjadi tiga model, yaitu:

Model Aktor Rasional : Dalam model ini berfokus pada para pembuat keputusan yang dianggap rasional dan kita umumnya cenderung berpikir bahwa keputusan (terutama yang menyangkut politik luar negeri) dibuat secara rasional.

Model Proses Organisasi : Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri bukanlah semata-mata proses intelektual, tetapi lebih merupakan proses mekanik.

Model Politik-Birokratis : Dalam model ini politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil dari proses intelektual yang menghubungkan tujuan dan sarana secara rasional. Politik luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan berpolitikan di antara berbagai aktor dan organisasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Model I (Aktor Rasional) untuk menjelaskan bagaimana RRT mengambil keputusan dalam konflik Myanmar tahun 2023. RRT dianggap sebagai aktor yang bertindak rasional dalam menjaga stabilitas, keamanan wilayah perbatasan, dan kepentingan ekonominya.

Metode

Tuliskan Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif berdasarkan tujuan penelitian dengan metode deskriptif untuk menjelaskan suatu fenomena sosial. Dalam penelitian eksplanatif-deskriptif, penulis berusaha menggambarkan secara rinci peristiwa yang terkait dengan posisi RRT dalam konflik Myanmar. Fokus penelitian adalah objek berupa gambaran posisi dan kebijakan pemerintah RRT dalam konflik insurgensi di Myanmar, termasuk alasan-alasan dan argumen yang disampaikan oleh RRT terkait keterlibatan atau posisi netralnya.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data diperoleh dari jurnal, artikel berita, laporan penelitian, dokumen resmi, dan sumber media lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka (*library research*), yaitu membaca dan menelaah literatur yang sudah tersedia terkait hubungan Myanmar-Tiongkok dan konflik Myanmar. Data dikumpulkan dengan membaca, mencatat, dan mengorganisir informasi dari sumber-sumber tersebut.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Peneliti menganalisis temuan dari literatur dengan membandingkan pendapat berbagai pengamat dan teori hubungan

internasional untuk menjawab rumusan masalah. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan pola-pola temuan dari teks dan dokumen terkait sikap Tiongkok dalam konflik Myanmar.

Hubungan Kerjasama Bilateral Myanmar-RRT

Sebelum kudeta tahun 2021, Myanmar dan Tiongkok memiliki hubungan yang sangat erat, khususnya dalam politik dan ekonomi. Pemerintah Tiongkok mendukung berbagai kebijakan Myanmar, termasuk penanganan isu Rohingya dan pengakuan pemerintahan militer Jenderal Min Aung Hlaing. Secara geografis, Myanmar terletak pada posisi yang strategis, berbatasan dengan Tiongkok di utara, Laos di timur, Thailand di tenggara, Bangladesh di barat, dan India di barat laut, serta memiliki teluk di selatan yang menghubungkannya hingga Malaysia. Myanmar kaya akan sumber daya alam seperti gas, minyak, dan tambang, sehingga banyak negara tertarik berinvestasi di sana. Sejak 1988 Myanmar menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi untuk menarik investasi asing, dan Tiongkok memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas kerja sama ekonomi.

Karena sumber daya melimpah dan posisinya strategis, Tiongkok pun banyak berinvestasi di Myanmar. Data tahun 2011 menunjukkan investasi Tiongkok mencapai 63% di sektor energi, 25% di gas dan minyak, 11% di pertambangan, dan 1% di manufaktur. Pada 2012, Tiongkok menjadi investor terbesar di Myanmar dengan total investasi sekitar US\$14,14 miliar sekitar 34,4% dari total FDI. Tahun 2013, Tiongkok menambah investasinya sekitar US\$14,1 miliar untuk berbagai proyek di Myanmar, termasuk pembangunan bendungan Myitsone. Perusahaan-perusahaan besar Tiongkok seperti CNPC, CPI, NORINCO, dan Sinohydro terlibat dalam pembangunan pembangkit listrik dan pengelolaan sumber daya di Myanmar. Selain itu, pada 2009 perusahaan Tiongkok CNPC bersepakat dengan perusahaan minyak Myanmar (MOGE) untuk membangun jalur pipa minyak dan gas dari Kyaukphyu menuju Kunming selama 30 tahun ke depan (Banerjee 2023).

Sebagai bagian dari inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road), pada November 2018 Myanmar menyetujui beberapa proyek besar dengan Tiongkok. Pelabuhan Kyaukphyu diperluas dengan investasi awal US\$1,8 miliar dan dijanjikan 100.000 lapangan kerja pelabuhan ini mengelola 85% ekspor-impor Myanmar dan menjadi titik awal jalur pipa menuju Kunming. Myanmar juga menyetujui pembangunan rel kereta Muse-Mandalay 431 km dan Kyaukphyu-Kunming 810 km dengan biaya sekitar US\$20 miliar studi dimulai 2018, konstruksi pada 2021. Pembangunan kota industri New Yangon dimulai Agustus 2019 investasi sekitar US\$1,5 miliar, serta proyek pembangkit listrik tenaga air di berbagai wilayah Myanmar (total investasi US\$180 juta untuk kapasitas 135 MW di Kyaukphyu). Semua proyek ini berjalan hingga 2021 namun kemudian menghadapi masalah setelah kudeta militer terjadi (Myanmar n.d.).

Tiongkok mendukung kebijakan Myanmar terkait Rohingya tanpa terlibat langsung, sehingga di mata internasional posisinya terlihat melindungi kepentingan Myanmar. Ketika kudeta terjadi pada 2021, Tiongkok bersama Rusia memblokir upaya PBB mengutuk kudeta. Laporan analis menyebutkan ada penerbangan rahasia dari Kunming ke Yangon pada Februari 2021 yang kemungkinan membawa pasukan atau senjata Tiongkok ke militer Myanmar, meski Tiongkok menyatakan penerbangan itu hanya membawa makanan laut. Tiongkok juga tidak menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB yang membahas kekerasan di Myanmar.

Sejak militer Jenderal Min Aung Hlaing berkuasa, kepercayaan Tiongkok menurun. Banyak proyek kerja sama dihentikan atau dikurangi pendanaannya karena masalah keamanan. Myanmar pun menyadari ketergantungannya pada Tiongkok dan mulai mengurangnya. Beberapa proyek dinegosiasi ulang: bagian saham Myanmar dinaikkan dari 15% menjadi 30% dan pendanaan proyek Kyaukphyu dipangkas sekitar 80%. Myanmar juga mulai bekerja sama lebih aktif dengan negara lain seperti India dan Jepang (Forum 2021).

Konflik internal di Myanmar makin meningkatkan ancaman terhadap aset Tiongkok. Pada 21 September 2021, Kedutaan Tiongkok meminta penambahan pengamanan. Pada 14 Februari 2022, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) menyerang fasilitas gas di Natogyi, menewaskan dua tentara Myanmar. Tahun 2023, kelompok Natogyi Guerrilla Force (NGF) berhasil menguasai pipa gas milik Tiongkok dan mengancam akan merusaknya. Situasi ini membuat Tiongkok berusaha menjaga hubungan dengan kedua pihak di Myanmar pemerintahan militer maupun kelompok pemberontak karena pemerintahan militer dinilai tidak mampu melindungi aset-aset Tiongkok, sementara pemberontak justru mengancam merusaknya (Lwin 2019).

Kronologi Konflik Internal di Myanmar 2023

Jenderal Ne Win memerintah Myanmar sejak kemerdekaan 1946 dan membangun rezim militer dengan partai sosialis tunggal. Ia memutuskan hubungan luar negeri dan bahkan mendemonstrasi uang rupiah lama, yang menghancurkan perekonomian dan memicu protes besar-besaran. Pada Agustus-September 1988 ribuan mahasiswa menggelar demonstrasi menuntut pengunduran dirinya. Militer merespons dengan kekerasan hingga ribuan tewas. Ne Win akhirnya mundur dan digantikan Jenderal Sein Lwin "Pembantai Rangoon" setelah berbulan-bulan kudeta yang menewaskan banyak orang (Maixler 2018).

Dari kejadian itu muncul tokoh oposisi Aung San Suu Kyi, yang tahun 1988 mendirikan partai Nasional Liga Demokrasi (NLD). Dalam pemilu 1990 NLD menang telak, tapi hasilnya dibatalkan oleh militer. Suu Kyi ditahan di rumah selama 15 tahun. Tekanan internasional besar muncul untuk membebaskannya. AS, PBB, dan Uni Eropa mengutuk junta dan memberi sanksi ekonomi investasi dan perdagangan Barat dihentikan sementara negara tetangga seperti Singapura dan Tiongkok tetap menanam modal.

Reformasi mulai terjadi setelah itu. Konstitusi baru 2008 disahkan, dan pemilu 2010 dimenangkan partai USDP pendukung militer karena NLD tidak ikut. Pada 2011 Thein Sein, mantan jenderal, menjadi presiden dan membuka media, membebaskan tahanan politik, serta memperbolehkan NLD ikut pemilu susulan. NLD pun menang besar dalam pemilu 2012 dan 2015 menguasai 86% kursi. Saat itu Presiden AS Obama dan PM Inggris David Cameron berkunjung ke Myanmar, dan sanksi internasional dicabut seiring perkembangan demokrasi (Tan 2014).

Pada pemilu 8 November 2020, NLD kembali menang gemilang (346 kursi). Partai militer USDP tak terima dan menuduh kecurangan tanpa bukti. Pengawas pemilu nasional dan internasional menyatakan proses berlangsung adil, sehingga gugatan USDP ditolak. Muncul ketegangan politik ketika militer memperingatkan akan menempuh konstitusional jika hasil tak diakui.

Pada 1 Februari 2021, militer Myanmar (Tatmadaw) melakukan kudeta saat parlemen baru akan dibentuk. Jenderal Min Aung Hlaing menyatakan darurat nasional, menangkap Suu Kyi, Presiden U Win Myint, dan pemimpin politik lainnya. Keesokan harinya dibentuklah Dewan Administrasi Negara yang dipimpin Min. Pemerintahan sipil resmi dibubarkan dan darurat diperpanjang hingga Agustus 2023 (Mckenna 2024).

Militer segera menutup media dan internet, membekukan layanan internasional, dan menutup banyak bank. Berbagai pegawai negeri (dokter, guru, perawat, pegawai bank) mogok kerja dan demonstrasi meletus di kota-kota besar. Warga sipil menolak membayar pajak dan memboikot bisnis militer, hingga banyak perusahaan asing memutuskan hubungan dengan junta. Pemerintah bayangan (NLD yang digulingkan dan perwakilan parlemen) bersama warga sipil menyerukan supaya negara-negara dunia memutuskan dukungan terhadap militer Myanmar, demi melemahkan sumber pendanaan junta (Paddock 2022).

Respons junta terhadap perlawanan keras dan brutal. Ribuan demonstran dan warga sipil tewas atau ditangkap dalam tahun pertama pasca kudeta. Banyak tahanan disiksa atau dibunuh, termasuk sekitar 50 anak-anak dalam penggerebekan malam. Di perbatasan utara dan timur, konflik berkepanjangan kembali memanas: misalnya di Kachin, pasukan etnis seperti KIA dan KNLA terus bertempur dengan militer. Tindakan militer yang kejam juga tercatat, seperti pengeboman dan pembakaran desa oleh junta.

Sebagai tanggapan, kelompok oposisi membentuk aliansi bersenjata. Para anggota NLD dan parlemen yang digulingkan membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) sebagai pemerintahan bayangan bertujuan menggantikan junta dan menyatukan kelompok bersenjata etnis anti-militer. Pada September 2021 NUG membentuk angkatan bersenjataanya sendiri, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF), serta menyatakan perang terhadap junta. Bahkan sejak Juni 2019 beberapa gerilyawan etnis terkemuka telah bersekutu dalam *Three Brotherhood Alliance* (Arakan Army, MNDAA, dan TNLA) untuk memperkuat perlawanan terhadap militer Myanmar (BBC Asia 2021).

Puncak konflik terjadi akhir 2023. Pada 27 Oktober 2023, operasi militer pemberontak besar-besaran "Operasi 1027" dilancarkan serentak di banyak kota. Serangan ini dilakukan oleh *Three Brotherhood Alliance* bersama NUG/PDF dan kelompok etnis lainnya. Serangan awalnya dipicu keberhasilan MNDAA merebut kota Lashio (ibukota Shan) pada Agustus 2023, suatu prestasi besar pertama kalinya ibu kota negara bagian direbut pemberontak. Pasukan gabungan menyerang di wilayah Rakhine, Kayah, Kachin, dan Sagaing. Arakan Army berhasil membebaskan sebagian besar Rakhine, sedangkan MNDAA dan TNLA mengambil alih sekitar 25 kota di utara Shan, termasuk Lashio.

Pemberontak terus menekan militer di Bulan November. Pasukan Karenni menyerbu ibu kota Kayah, Loikaw, mengambil alih kampus universitas pada 15 November. Tanggal 3 November, PDF bersama KIA dan AA menyerang Sagaing (pusat operasi NUG) dan merebut kota Kawlin dan Khampat serta meruntuhkan jembatan utama penghubung Sagaing-Kachin. Secara keseluruhan, pemberontak membebaskan 48 kota dan sekitar 300 pangkalan militer. Bentrokan sengit menewaskan ratusan orang, dan kira-kira 6.000 tentara junta (termasuk seorang brigadir jenderal) berhasil ditangkap serta diserahkan kepada aliansi pemberontak.

Hasil operasi ini menunjukkan eskalasi tajam konflik internal Myanmar sepanjang tahun 2023 (Thit 2024).

Motif Kepentingan RRT Dalam Konflik Myanmar

ASEAN dan pihak lain gagal menyelesaikan krisis Myanmar, sehingga sejak kudeta 2021 RRT muncul sebagai penengah konflik. Tiongkok mengadakan pertemuan berulang dengan militer junta dan kelompok pemberontak, walau hasilnya minim. Sepanjang 2023, RRT mengambil posisi “netral-aktif”: diplomasi ganda kepada militer junta dan Aliansi Three Brotherhood, memberi dukungan logistik terbatas kepada pemberontak, serta menindak jaringan penipuan di perbatasan. Strategi ini bertujuan menjaga kepentingan nasional dengan tidak bergantung pada satu pihak, sambil mempertahankan jalur ekonomi dan investasi strategisnya di Myanmar (Naing 2023).

Dari sisi ekonomi, RRT memiliki banyak proyek Belt and Road di Myanmar seperti jalur pipa minyak, koridor ekonomi, rel kereta, pelabuhan, tambang, dan bendungan pembangkit listrik, yang kerap tertunda karena konflik. RRT lalu mendekati kelompok pemberontak etnis (EAOs) agar pembangunan bisa berlangsung tanpa gangguan. Namun dukungan diam-diam ke pemberontak justru memperpanjang konflik. Contohnya, koridor ekonomi di Shan utara yang dikuasai militan MNDAA ditutup, sehingga ekspor-impor Myanmar ke Cina tersendat. Akibatnya, perdagangan Myanmar–Cina anjlok tajam dari US\$640 juta menjadi US\$417 juta dan nilai kyat melemah, memperparah krisis ekonomi Myanmar (Michaels 2023).

Proyek infrastruktur lain juga terganggu. Jalur kereta Kyaukphyu–Kunming terhenti di daerah konflik, sehingga RRT kembali merundingkan akses dagang melalui EAOs. Kondisi serupa pada pipa gas dan minyak: Tiongkok meminta penjagaan ketat, dan EAOs berjanji tidak memicu kerusuhan di sana, namun junta malah mengebom jalur itu sehingga ketegangan kembali meningkat.

Dari sisi keamanan, RRT sangat memperhatikan stabilitas perbatasan dengan Cina. Provinsi Shan dan Rakhine berbatasan langsung sering terjadi konflik antara militer Myanmar dengan pemberontak MNDAA di Kokang, Arakan Army di Laiza, yang menyebabkan banyak pengungsi dan korban di wilayah perbatasan. Situasi makin memburuk dengan kejahatan lintas batas narkoba, perdagangan manusia, penambangan ilegal. Muncul pula pusat-pusat “scam” dunia maya yang dikelola mafia Tiongkok. Karena pemerintah junta tak menindak, RRT sendiri memburu 40 pusat scam di wilayah Wa-Mong La pada 2022–2023, membebaskan sekitar 4.000 warga Tionghoa dari sandera (Zhiyun 2023).

Sejumlah pemberontak MNDAA, AA, dan TNLA membentuk Aliansi Three Brotherhood untuk Operasi 1027 merebut wilayah Shan utara. Ada indikasi RRT terlibat: militer Myanmar menemukan drone Cina dalam operasi itu, dan Arakan Army mengakui sebagian senjata mereka dari “sumbangan” RRT demi melindungi investasi Tiongkok di Rakhine pelabuhan Kyaukphyu dan pipa minyak. Meski tak tampak, RRT tetap menjaga hubungan erat dengan pemberontak seperti AA dan United Wa State Army (UWSA) untuk melindungi proyek ekonominya di sana (Reuters 2023).

Secara keseluruhan, RRT menekankan pendekatan damai: mengadakan pertemuan dengan militer dan EAOs agar pembangunan dan keamanan terjaga tanpa mengganggu asetnya. Namun kebijakan “aktif-damai” ini justru memicu eskalasi konflik: intervensi RRT terhadap pusat scam dan dukungan tersembunyi ke pemberontak memperkuat legitimasi militan dalam operasi seperti Operasi 1027. Penulis menyimpulkan bahwa semua langkah RRT bertujuan menengahi kedua pihak agar kepentingan ekonomi dan keamanan RRT tetap terjamin.

Analisis Posisi RRT Dalam Konflik Internal Myanmar Di Tahun 2023

Posisi Tiongkok dalam konflik internal Myanmar tahun 2023 bersifat netral-aktif. Artinya, pemerintah RRT tidak terang-terangan memihak salah satu pihak, tetapi tetap berperan aktif menjaga stabilitas demi kepentingannya sendiri. Sejak awal konflik, China mendekati kedua kubu pemerintahan junta militer maupun kelompok bersenjata etnis (EAOs) untuk memastikan situasi tetap terkendali. Pemerintah pusat Tiongkok menekankan pentingnya stabilitas regional karena kekacauan bisa mengganggu jalur ekonomi vital mereka dan menimbulkan gelombang pengungsi ke wilayah perbatasan. Bersamaan itu, RRT prihatin dengan pengaruh Barat seperti dukungan Amerika terhadap oposisi (NUG), sehingga diplomasi China juga berupaya mencegah Myanmar terlalu bergantung pada kekuatan asing.

Strategi utama China adalah menjaga keseimbangan. Di satu sisi, China memberi dukungan diplomatik dan ekonomi kepada pemerintahan junta agar rezim militer tetap stabil dan proyek bersama tidak terganggu. Contohnya, pada 2021 China mendorong ASEAN untuk tetap mengundang pemimpin junta ke pertemuan regional, demi mempertahankan legitimasi rezim yang pro-Tiongkok. Di sisi lain, China secara diam-diam memperkuat hubungan dengan kelompok etnis bersenjata yang menguasai wilayah perbatasan. RRT mengusahakan perjanjian gencatan senjata lokal dan dialog antar pihak di Kunming, serta memberikan bantuan logistik terbatas kepada kelompok seperti Aliansi Tiga Saudara. Pendekatan ini membantu China tetap berpengaruh di semua pihak penting tanpa memperlihatkan sikap berpihak sepihak.

Di bidang ekonomi, kepentingan China sangat besar. Banyak proyek infrastruktur Belt and Road (BRI) berlokasi di Myanmar, seperti pipa minyak-gas dari Kyaukphyu ke Yunnan, rel kereta, dan pelabuhan. Karena itu, RRT berusaha melindungi investasi senilai miliaran dolar tersebut. Perusahaan-perusahaan negara seperti CNPC dan CITIC tetap beroperasi meski ada konflik, memperkuat pengamanan bersama militer Myanmar, dan menjalin komunikasi dengan pemimpin lokal atau kelompok pemberontak agar proyek jalan, pipa, dan pertambangan tidak dihancurkan. Misalnya, China menegosiasikan keamanan tambahan di jalur pipa gas yang sempat menjadi sasaran konflik. Dengan cara pragmatis, perusahaan-perusahaan ini memilih netral di tengah sengketa lokal dan lebih fokus menjamin kelangsungan ekonomi sambil memberi sumbangan sosial kepada komunitas desa demi menjaga dukungan masyarakat sekitar.

Dari sisi keamanan dan sosial, Tiongkok juga aktif mengamankan perbatasannya. Kementerian Keamanan China (PSB) meningkatkan patroli bersama militer di Yunnan, mengkoordinasikan operasi penegakan hukum lintas negara.

China giat menumpas sindikat penipuan daring (scam center) dan jaringan kejahatan lintas-batas yang merugikan warga Tionghoa. Misalnya, pertemuan tinggi pada akhir 2023 antara Menteri Keamanan China dan pejabat Myanmar membahas pengamanan wilayah perbatasan dan pemberantasan penipuan Internet. Ketika pertempuran besar terjadi di Kokang pada akhir tahun, PSB mengatur evakuasi warga Tiongkok dari daerah konflik dan mengerahkan patroli ekstra agar stabilitas dalam negeri tetap terjaga. Semua tindakan ini dilakukan tanpa mengintervensi konflik Myanmar secara terbuka; lebih pada melindungi warga dan investasi Tiongkok sambil mendorong perdamaian.

Secara keseluruhan, pada 2023 Tiongkok bersikap waspada dan pragmatis dalam konflik Myanmar. Pemerintah pusat fokus menjaga Myanmar tetap stabil dan selaras dengan kepentingan jangka panjang China, yaitu keamanan koridor ekonomi dan penghindaran pengaruh luar. Lewat diplomasi “netral-aktif”, China berupaya meredam kekerasan, meminta semua pihak menghentikan pertumpahan darah, dan menjaga komunikasi dengan pemerintahan Myanmar maupun pemimpin etnis bersenjata. Dengan pendekatan ini, Tiongkok berharap dapat melindungi investasinya, menjaga keamanan perbatasan, serta menghindari krisis yang lebih besar yang bisa mengganggu kepentingan nasionalnya di kawasan.

Kesimpulan

Konflik internal Myanmar tahun 2023 menunjukkan dinamika yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dan kepentingan, baik dari dalam negeri Myanmar maupun dari negara lain seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam kasus ini, pendekatan teori pengambilan keputusan Snyder, khususnya model politik birokratis, membantu menjelaskan bagaimana keputusan luar negeri RRT dibentuk oleh banyak aktor dan kepentingan yang saling berinteraksi.

RRT memiliki kepentingan strategis di Myanmar, termasuk menjaga stabilitas perbatasan, melindungi investasi proyek Belt and Road Initiative (BRI), serta memberantas kejahatan lintas batas seperti scam center. Aktor-aktor dalam birokrasi RRT seperti Presiden Xi Jinping dan Politbiro, Kementerian Luar Negeri, Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), Kementerian Keamanan Publik (PSB), hingga BUMN seperti CNPC dan CITIC memainkan peran berbeda-beda namun saling melengkapi dalam menentukan arah kebijakan luar negeri RRT terhadap Myanmar.

Secara umum, RRT bersikap netral-aktif, yaitu tidak memihak secara terbuka pada satu pihak dalam konflik, tetapi tetap aktif mengupayakan stabilitas demi menjaga kepentingan nasionalnya. Upaya mediasi damai, dukungan terhadap proyek ekonomi, peningkatan keamanan di perbatasan, dan perlindungan terhadap warga negaranya adalah bentuk dari pendekatan ini. Bahkan saat terjadi Operasi 1027 oleh kelompok pemberontak, RRT lebih fokus pada upaya menjaga keamanan aset dan wilayah perbatasannya, tanpa memberikan dukungan langsung pada pihak manapun.

Meskipun ada dugaan keterlibatan tidak langsung dalam konflik (seperti penggunaan drone buatan RRT oleh kelompok pemberontak), secara keseluruhan posisi RRT tetap konsisten dengan prinsip non-intervensi dan stabilitas regional. Dengan demikian, posisi RRT dalam konflik Myanmar 2023 dapat dikategorikan

sebagai netral, namun tetap aktif dalam menjaga keamanan, ekonomi, dan pengaruhnya di kawasan tersebut.

Daftar Pustaka

Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford University Press, 1959.

Marx, Karl. *Manifesto Partai Komunis*. Buku Kompas, 2010.

Waber, Max. *The Theory Of Social and Economic Organization*. Free Press, 1947.

Banerjee. *Observer Research Foundation*. Diakses pada 16 Januari 2025, dari <https://www.orfonline.org/expert-speak/myanmars-trade-relations-with-china>.

BBC asia (n.d.). *Myanmar coup: Six-year-old shot 'as she ran into father's arms'*. Diakses pada 1 April 2021, dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-56501871>.

Forum, Indo-Pasific Defence. *Indo-Pasific Defence Forum*.(n.d.) Diakses pada 9 Desember 2024, dari <https://ipdefenseforum.com/id/2021/03/rrt-bersikap-lunak-terhadap-kudeta-myanmar-sementara-itu-mitra-indo-pasifik-mengutuk-kekerasan/>.

Lwin, Nan. *Infographic: 30 Years of Chinese Investment in Myanmar*. Diakses pada 25 Januari 2025, dari <https://www.irrawaddy.com/specials/infographic-30-years-chinese-investment-myanmar.htm>.

Maixler, Eli. *How a Failed Democracy Uprising Set the Stage for Myanmar's Future*. Diakses pada 31 Januari 2025, dari <https://time.com/5360637/myanmar-8888-uprising-30-anniversary-democracy/>.

Maizland, Lindsay. *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Diakses pada 19 Mei 2024, dari <https://www.cfr.org/background/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>.

Mckenna, Amy. 2021 Myanmar coup d'état. Diakses pada 6 Mei 2024, dari <https://www.britannica.com/event/2021-Myanmar-coup-d-etat>.

Micheals, Morgan. *IISS Myanmar Conflic Map*. Diakses pada 19 Februari 2025, dari <https://myanmar.iiss.org/analysis/chinas-growing-involvement>

Myanmar, Marine Port Authority of. *Marine Port Authority of Myanmar*. (n.d.). Diakses pada 20 Januari 2025, dari <https://www.mpa.gov.mm/ports/kyaukphyu-deep-sea-port/>

Naing, Ingyin. *Peace Talks in Myanmar Highlight China's Increasing Influence*. Diakses pada 8 Februari 2025, dari <https://www.voanews.com/a/peace-talks-in-myanmar-highlight-china-s-increasing-influence/7122243.html>

Paddock, Richard C. *Myanmar's Coup and Its Aftermath, Explained*. Diakses pada 29 Januari 2025, dari <https://www.nytimes.com/article/myanmar-news-protests-coup.html>.

Reuters.(n.d.) *China says will ensure security, stability at border with Myanmar*. Diakses pada 2 Mei 2025, dari <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-says-will-ensure-security-stability-border-with-myanmar-2023-11-10/#:~:text=China%20has%20repeatedly%20called%20for,and%20to%20prevent%20further%20casualties>

Tan, Paige. *Aung San Suu Kyi: A Leader Born, a Leader Made*. Diakses pada 28 Januari 2025, dari <https://www.asianstudies.org/publications/eaarchives/aung-san-suu-kyi-a-leader-born-a-leader-made/>

Tandai Turner, Anthan McCarthy-Jones. *Cyber slavery starts up in Southeast Asia*. Diakses pada 20 Mei 2024, dari <https://eastasiaforum.org/2023/06/14/cyber-slavery-starts-up-in-southeast-asia/>

Thit, Nyat. *How Operation 1027 Transformed War Against Myanmar Junta*. Diakses pada 30 Januari 2025, dari <https://www.irrawaddy.com/news/war-against-the-junta/how-operation-1027-transformed-war-against-myanmar-junta.html>

Zhiyun, Kay. *Shooting Chinese people, resulting in more than 60 deaths and injuries! What was the outcome of the "1020 Incident"?*. Diakses pada 25 Februari 2025, dari https://mp.weixin.qq.com/s/uI0nQd0mmeHkUIZGWg8dpw?fbclid=IwAR1L3BUcAGfTIIEO0rc3n-xqECJoSg-teXiVhWGT4j421_c35QfMlkckTn0